



Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Indonesia dan Upaya Mengatasinya: Perspektif Filsafat Ilmu

Muhammad Rafeli Fakhli¹, Budi Purwoko², Lamijan Hadi Susarno³

^{1,2,3}Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 24010905009@mhs.unesa.ac.id, budipurwoko@unesa.ac.id, lamijansusarno@unesa.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-12-15 Revised: 2025-01-22 Published: 2025-02-01 Keywords: <i>Education Problems; Indonesian Education; Philosophy of Science.</i>	Education in Indonesia faces various challenges, including inequality in access to education, lack of appreciation for educators, low quality of educational facilities and low competence of qualified educators, as well as the dominance of exam and number-based approaches. This research aims to analyze these problems through the perspective of philosophy of science by using a qualitative approach based on literature study. The results show that the application of the concept of distributive justice, optimization of educational technology, improving the welfare of educators, and curriculum reform that is relevant to the needs of the times are strategic steps to overcome this problem. With a holistic approach, it is expected that education in Indonesia can become more inclusive, fair, and able to support sustainable human development.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-12-15 Direvisi: 2025-01-22 Dipublikasi: 2025-02-01 Kata kunci: <i>Permasalahan Pendidikan; Pendidikan Indonesia; Filsafat Ilmu.</i>	Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan akses pendidikan, kurangnya apresiasi terhadap tenaga pendidik, rendahnya kualitas fasilitas pendidikan dan rendahnya kompetensi pendidik yang berkualitas, serta dominasi pendekatan berbasis ujian dan angka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut melalui perspektif filsafat ilmu dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep keadilan distributif, optimalisasi teknologi pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta reformasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan pendekatan holistik, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan mampu mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia dan peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, sektor pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses, kurangnya apresiasi terhadap para pendidik yang juga akhirnya mempengaruhi kualitas pengajaran dan kualitas siswa yang dihasilkan. Isu ini diperparah dengan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang mencolok. Pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil sering kali tidak menjadi prioritas, sehingga siswa di wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Menurut penelitian oleh (Fitri et al., 2021), tantangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai di tengah pandemi Covid-19 semakin memperlihatkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, (Leonard, 2015) mengungkapkan bahwa

rendahnya kualitas sumber daya manusia guru berdampak signifikan terhadap kompetensi tenaga pendidik di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian oleh (Perdana, 2015) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan untuk anak-anak di Indonesia mencakup aspek ekonomi, geografis, dan sosial.

Ketimpangan ini memiliki dampak signifikan pada kemampuan sumber daya manusia untuk bersaing di era global. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendidikan di Indonesia masih tinggi, yang berdampak pada ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Wardhana et al., 2023). Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2018-2021 menunjukkan angka yang rendah bila dibandingkan dengan negara lain di dunia (Patandung & Panggua, 2022). Sementara itu di tengah tantangan globalisasi yang membawa dampak besar terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda, penting bagi sistem pendidikan untuk tidak hanya fokus pada pencapaian

intelektual, (ujian dan angka) tetapi juga pada pembentukan karakter yang berkesinambungan. Hal ini menjadi krusial karena generasi yang cerdas akademik namun kurang berkarakter akan menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menghadapi tantangan hidup yang kompleks (Sinurat, 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara maju seperti Finlandia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum, menghasilkan individu yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki keterampilan sosial yang baik (Sahlberg, 2021).

Dari perspektif filsafat ilmu, pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan memberdayakan individu tanpa memandang perbedaan geografis dan sosial ekonomi. Namun, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dalam filsafat pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi permasalahan ini, seperti peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional (Darma, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia dari perspektif filsafat ilmu, dengan fokus pada ketimpangan akses, orientasi pembelajaran, dan penghargaan terhadap pendidik. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia dan upaya penyelesaiannya dari perspektif filsafat ilmu. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data sekunder yang mendalam dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah bereputasi, laporan kebijakan, dan dokumen pendidikan yang relevan. Sumber data difokuskan pada publikasi ilmiah yang terindeks di Scopus, Google Scholar, Web of Science, dan Garuda, serta artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir

untuk menjaga relevansi penelitian dengan kondisi terkini (Barrenechea et al., 2023).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti "permasalahan Pendidikan di Indonesia" secara umum kemudian ditemukanlah salah satu di antaranya: "ketimpangan akses pendidikan di Indonesia", "filsafat ilmu dalam pendidikan", Artikel yang memenuhi kriteria seleksi dipilih berdasarkan relevansi isi, kualitas publikasi, dan kontribusinya terhadap topik penelitian. Peneliti kemudian menyusun katalog sumber-sumber yang dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi, dengan fokus pada identifikasi tema-tema utama yang terkait dengan ketimpangan akses pendidikan, pendekatan filsafat ilmu, dan solusi yang berbasis teknologi pendidikan (Thwe & Kálmán, 2024).

Analisis data dilakukan melalui sintesis berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan pola, tema, dan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Validitas penelitian dijaga dengan mengutamakan sumber-sumber yang telah diverifikasi dan berasal dari jurnal bereputasi. Proses ini menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada filsafat ilmu, seperti redistribusi sumber daya pendidikan dan pemanfaatan teknologi untuk pemerataan akses pendidikan (Barrenechea et al., 2023; Subkhan, 2023; Thwe & Kálmán, 2024).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketimpangan Akses Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa akses pendidikan di Indonesia masih belum merata. Ketimpangan ini terlihat dari berbagai aspek, seperti ketersediaan infrastruktur, tenaga pengajar, dan kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki keberagaman kondisi geografis dan sosial ekonomi di setiap wilayah. Salah satu bentuk nyata dari ketimpangan ini adalah perbedaan mencolok antara daerah perkotaan, terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, dengan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

seperti Kabupaten Asmat di Papua, Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara. Di kota-kota besar, siswa umumnya memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan modern, dan konektivitas internet yang baik. Sebaliknya, di daerah 3T, banyak sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, fasilitas pendukung pembelajaran, bahkan tenaga pengajar yang kompeten. Penelitian oleh (Muttaqin, 2018) menyoroti bahwa akses internet yang tidak merata, kesenjangan kualifikasi guru, dan kualitas pendidikan menjadi kerentanan dalam inisiatif pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Selain itu, studi oleh (Riyadi & Ghuzini, 2022) mengungkapkan bahwa ketimpangan pendidikan dan pendapatan di daerah 3T berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, memperparah disparitas antara wilayah maju dan tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa di daerah 3T menghadapi tantangan tambahan dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Salah satu indikator ketimpangan ini yang lain juga adalah konsentrasi universitas terbaik dan favorit yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Kondisi ini memaksa calon mahasiswa dari wilayah 3T untuk bermigrasi ke Jawa demi mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas, yang tidak selalu memungkinkan karena keterbatasan ekonomi dan sosial. Akibatnya, potensi sumber daya manusia di wilayah 3T kurang teroptimalkan, memperparah disparitas pembangunan antarwilayah.

Dari perspektif filsafat ilmu, pendidikan seharusnya menjadi medium untuk menciptakan keadilan sosial dan memberdayakan individu, tanpa memandang perbedaan geografis dan sosial ekonomi. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan konsep keadilan distributif, yang menekankan distribusi sumber daya pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah 3T. Hal ini mencakup pembangunan sekolah, laboratorium, dan perpustakaan yang setara dengan fasilitas di perkotaan. Selain itu, insentif bagi tenaga pengajar yang bersedia mengajar di daerah terpencil, seperti peningkatan gaji, fasilitas pendukung, dan akses pelatihan berkelan-

jutan, dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di wilayah tersebut (Ahmad, 2018).

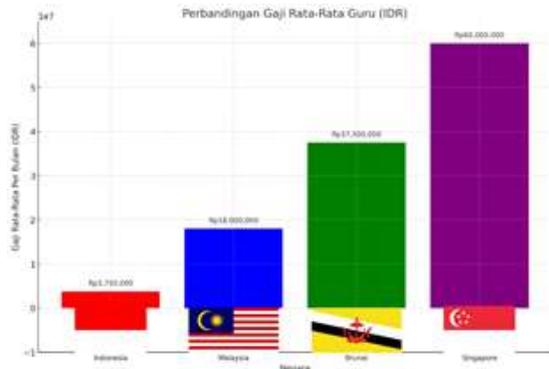
Penerapan teknologi pendidikan juga menjadi solusi yang strategis. Dengan memanfaatkan pembelajaran daring dan platform digital, siswa di wilayah terpencil dapat mengakses sumber belajar yang sama dengan siswa di perkotaan. Teknologi ini tidak hanya menjembatani kesenjangan geografis tetapi juga membuka peluang baru dalam metode pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel. Perspektif filsafat ilmu melihat teknologi sebagai alat yang dapat digunakan untuk memperluas akses pengetahuan dan menghilangkan hambatan fisik yang selama ini menjadi kendala utama. Namun, untuk mengoptimalkan teknologi pendidikan, diperlukan upaya memperkuat infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang stabil dan ketersediaan perangkat teknologi di daerah 3T. Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital, serta pendekatan keadilan distributif, diharapkan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia dapat diminimalkan, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang secara optimal. (Asdar & Barus, 2023)

B. Kurangnya Apresiasi Terhadap Pendidik

Kurangnya apresiasi terhadap para pendidik di Indonesia tercermin dari rendahnya gaji rata-rata guru dan dosen dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menurut data, gaji guru di Indonesia berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan untuk guru ASN, dan Rp1 juta hingga Rp3 juta per bulan untuk guru honorer, tergantung pada daerah dan sumber dana. (*Gaji Guru Indonesia vs Malaysia vs Singapura: Seberapa Jauh Perbedaannya?*, 2024). Sebagai perbandingan, di Malaysia, gaji guru pemula berkisar antara MYR 2.500 hingga MYR 4.000 per bulan (sekitar Rp8,2 juta hingga Rp13 juta), dengan tambahan tunjangan khusus bagi guru yang mengajar di daerah pedalaman. (*Kesenjangan Gaji Guru Di Indonesia: Perbandingan Dengan ASEAN Dan G20*, 2024)

Di Brunei, rata-rata gaji pekerja adalah sekitar BND 3.230 per bulan, dengan rentang antara BND 810 hingga BND 14.400 (sekitar Rp35 juta) dengan gaji terendah saja sudah sekitar Rp8 juta, tergantung pada profesi dan

tingkat pengalaman. Sementara itu, di Singapura, gaji guru pemula berkisar antara SGD 3.000 hingga SGD 6.000 per bulan (sekitar Rp33 juta hingga Rp67 juta), dengan pemerintah memberikan pelatihan berkala dan bonus berbasis kinerja untuk memastikan kualitas pendidikan. (*Isu Menarik Terkait Kenaikan Gaji Guru Di Indonesia: Bagaimana Dibandingkan Dengan Negara ASEAN Dan Dunia, 2024*)



Gambar 1. Perbandingan Gaji rata-rata Pendidik (terlihat Indonesia salah satu terendah di kawasan Asia Tenggara)

Perbedaan signifikan dalam kesejahteraan finansial ini berdampak pada motivasi dan minat generasi muda Indonesia untuk menekuni profesi pendidik. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti akses pelatihan berkualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan turut memperparah situasi. Penelitian oleh (Muslim & Setyono, 2023) mengungkapkan bahwa literasi digital dan inovasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Malang, Indonesia.

Dari perspektif filsafat ilmu, rendahnya apresiasi terhadap pendidik mencerminkan lemahnya pengakuan masyarakat terhadap nilai epistemik yang mereka kontribusikan. Filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan cara berpikir kritis dan karakter moral. Oleh karena itu, penghargaan yang layak kepada para pendidik adalah wujud nyata pengakuan terhadap peran vital mereka dalam membangun landasan epistemik Masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil, antara lain: peningkatan alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan gaji guru dan dosen mencapai standar hidup layak, seperti yang diamanatkan oleh (Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005,

n.d.) tentang Guru dan Dosen. Pemerintah juga perlu memperluas program sertifikasi pendidik dengan sistem insentif berbasis kompetensi dan hasil, sebagaimana diterapkan di negara-negara maju. Selain itu, filsafat ilmu dapat menjadi panduan untuk menciptakan budaya pendidikan yang lebih menghargai para pendidik dengan menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap ilmu pengetahuan sejak dini dalam kurikulum.

Data dan temuan ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan pendidik sebagai langkah mendasar untuk mendorong kualitas pendidikan nasional. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap profesi pendidik akan memperkuat tonggak kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya peningkatan apresiasi terhadap pendidik tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga berdampak positif pada kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

C. Kurangnya Akses dalam Fasilitas Pendidikan yang Memadai

Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai di Indonesia merupakan isu krusial yang berdampak signifikan terhadap kualitas peserta didik. Fasilitas yang sering kali kurang mencakup ruang kelas yang layak, laboratorium sains, perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai, akses internet, dan peralatan teknologi pendidikan. Ketiadaan fasilitas ini menghambat proses pembelajaran yang efektif dan membatasi pengembangan keterampilan siswa, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Menurut penelitian, ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Kurniawati, 2022).

Ketidakmerataan akses terhadap fasilitas pendidikan ini lebih sering ditemukan di daerah pedesaan dan terpencil, sementara kota-kota besar cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan modern. Hal ini menyebabkan disparitas dalam kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Siswa di daerah terpencil sering kali harus belajar dalam kondisi yang kurang mendukung, seperti ruang kelas yang rusak, minimnya akses terhadap bahan ajar, dan

ketiadaan guru yang berkualitas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya prestasi akademik dan keterampilan siswa di daerah tersebut, sehingga memperlebar kesenjangan pendidikan di Indonesia (Ahmad, 2018).

Dari perspektif filsafat ilmu, pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk memanusiakan manusia dan membebaskan individu dari kebodohan serta ketidakadilan. Oleh karena itu, ketidakmerataan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta distribusi sumber daya pendidikan yang lebih merata. Selain itu, penerapan teknologi pendidikan dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan akses informasi dan pembelajaran antara daerah perkotaan dan perdesaan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus mampu memberdayakan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Pratama et al., 2022).

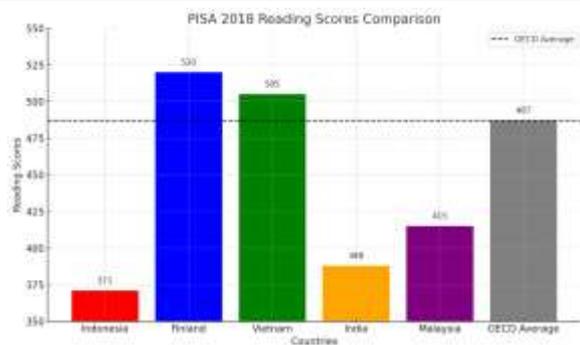
D. Rendahnya Kompetensi Pendidik yang Berkualitas

Rendahnya kompetensi pendidik di Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan nasional. Menurut (Leonard, 2015), tenaga pendidik yang kompeten sangat penting untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru belum memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam hal mendesain pembelajaran, penelitian, dan penguasaan bahasa asing. Salah satu bukti nyata dari rendahnya kompetensi ini adalah kurangnya kesiapan guru dalam menghadapi perkembangan teknologi di era globalisasi. (Hulu, 2023) mengidentifikasi hambatan-hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan isu privasi dalam pengintegrasian teknologi pendidikan. Selain itu, banyak guru yang masih mempertahankan metode pengajaran tradisional, seperti ceramah, yang sering dianggap membosankan dan membuat siswa pasif, sehingga mengurangi minat dan motivasi belajar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan profesionalisme guru di era revolusi industri 4.0 menekankan bahwa guru harus meningkatkan kualitas diri secara mandiri dan melalui pelatihan yang diberikan. Selain itu, adaptasi dengan kurikulum global dan penguasaan teknologi digital menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari perspektif filsafat ilmu, pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Guru sebagai agen perubahan dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi dengan inovasi dalam pendidikan. (Nastiti & 'Abdu, 2020) menunjukkan bahwa kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era society 5.0 menuntut pendidik untuk memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif guna menghadapi tantangan pendidikan di era globalisasi.

E. Kurangnya Pengembangan Karakter dan Etika (Terlalu Fokus pada Ujian dan Angka)

Sistem pendidikan di Indonesia cenderung berorientasi pada hasil ujian dan angka, sehingga aspek pengembangan karakter, etika, dan keterampilan kritis sering terabaikan. Hal ini menghambat siswa untuk mengembangkan kompetensi yang holistik. Meskipun begitu menurut mantan Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sejak usia dini anak-anak Indonesia itu termasuk yang paling hebat di dunia. Umumnya anak-anak Indonesia sudah mampu membaca dan menulis pada usia 5-6 tahun. Namun, seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, terutama setelah kelas 4 SD, performa akademik mereka cenderung menurun dibandingkan dengan anak-anak dari negara lain seperti Finlandia dan Vietnam. Hal ini tercermin dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, di mana skor membaca siswa Indonesia berada di bawah rata-rata OECD, sementara negara-negara seperti Finlandia dan Vietnam menunjukkan performa yang lebih baik. (PISA 2018 Results, 2019)



Gambar 2. Grafik di atas menunjukkan perbandingan skor membaca PISA 2018 antara Indonesia dan beberapa negara lainnya seperti Finlandia, Vietnam, India, dan Malaysia. Garis putus-putus menunjukkan rata-rata OECD (487).

Salah satu penyebab fenomena ini adalah pendekatan pendidikan yang terlalu berfokus pada hasil ujian dan angka, sehingga aspek pengembangan karakter, etika, dan keterampilan berpikir kritis kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, siswa yang tidak mencapai nilai akademik tinggi sering kali merasa terpinggirkan dan menganggap sekolah sebagai tempat yang membosankan. Padahal, setiap anak memiliki potensi dan karakter unik yang tidak dapat diukur hanya melalui nilai akademik semata. Sebaliknya, negara-negara seperti Jepang dan Finlandia menekankan pendidikan karakter dan etika sejak usia dini, dengan tujuan membentuk individu yang berintegritas dan memiliki keterampilan sosial yang baik

Dari perspektif filsafat ilmu, pendidikan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai medium untuk membentuk karakter dan mengembangkan potensi individu secara holistik. Filsafat pendidikan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran (Noddings, 2013). Oleh karena itu, sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada hasil ujian dapat menghambat perkembangan individu yang seutuhnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan reformasi pendidikan yang menekankan pengembangan karakter dan etika, serta pengakuan terhadap keunikan dan potensi setiap anak. Implementasi kurikulum yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, seperti yang diterapkan di Finlandia, dapat menjadi salah satu solusi

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Sahlberg, 2021).

Selain itu, penting untuk mengubah paradigma pendidik dan masyarakat mengenai definisi kesuksesan dalam pendidikan. Kesuksesan tidak seharusnya diukur hanya dari pencapaian akademik, tetapi juga dari kemampuan siswa dalam berpikir kritis, beretika, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan siswa Indonesia dapat berkembang menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan etika yang kuat, sesuai dengan tujuan pendidikan yang holistik (Noddings, 2013).

Penelitian ini terbatas hanya membahas beberapa permasalahan-permasalahan umum pendidikan di negara Indonesia secara umum dan upaya mengatasinya dari perspektif filsafat ilmu. Kami berharap penelitian selanjutnya dapat menjabarkan permasalahan-permasalahan lain yang lebih kompleks dari berbagai perspektif serta langkah-langkah yang harus di ambil dalam mengatasinya dengan cakupan penelitian yang lebih luas di tingkat kawasan Nusantara atau bahkan ASEAN.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Masalah pendidikan di Indonesia, seperti ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah 3T, kurangnya fasilitas belajar, serta minimnya perhatian terhadap kesejahteraan guru, masih menjadi tantangan besar. Untuk mengatasi hal ini, konsep keadilan distributif dapat diterapkan dengan memastikan alokasi anggaran yang lebih merata, terutama untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, penggunaan teknologi pendidikan, seperti pembelajaran daring, dapat menjadi solusi untuk menjangkau siswa di wilayah yang sulit dijangkau. Pendekatan ini tidak hanya membantu pemerataan akses pendidikan tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia.

Agar pendidikan di Indonesia lebih maju, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pendidik, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Penghargaan terhadap peran guru, melalui peningkatan gaji dan pelatihan yang berkelanjutan, sangat penting

untuk memastikan kualitas pengajaran yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih adil dan memberikan peluang yang sama bagi semua anak bangsa untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan negara.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Indonesia dan Upaya Mengatasinya: Perspektif Filsafat Ilmu.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, S. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153-171.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26594/dirasat>
- Asdar, M., & Barus, C. A. (2023). Analisis Perbandingan Perkembangan Kognitif Siswa SD dan SMP Berdasarkan Teori Piaget selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran*, 8(1), 148.
<https://doi.org/10.33394/jtp.v8i1.5974>
- Barrenechea, I., Beech, J., & Rivas, A. (2023). How can education systems improve? A systematic literature review. *Journal of Educational Change*, 24(3), 479-499.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10833-022-09453-7>
- Darma, R. (2024). Efektivitas Manajemen Publik dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia. , 7(4), 15429-15436. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 15429-15436.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36712>
- Fitri, W., Octaria, M., Irvanaries, I., Suwanny, N., Sisilia, S., & Firnando, F. (2021). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46799/>
- [jst.v1i10.181](https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jst.v1i10.181)
- Gaji Guru Indonesia vs Malaysia vs Singapura: Seberapa Jauh Perbedaannya?* (2024). Suara.Com.
- Hulu, Y. (2023). Problematika Guru Dalam Pengembangan Teknologi dan Media Pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(6), 840-846.
<https://doi.org/10.31004/anthor.v2i6.285>
- Isu Menarik Terkait Kenaikan Gaji Guru di Indonesia: Bagaimana Dibandingkan dengan Negara ASEAN dan Dunia.* (2024). Melintas.Id.
- Kesenjangan Gaji Guru di Indonesia: Perbandingan dengan ASEAN dan G20.* (2024). Media Indonesia.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1-13.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Leonard, L. (2015). Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 5(3), 192-201.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30998/formatif.v5i3.643>
- Muslim, A. Q., & Setyono, L. (2023). The Role of Digital Literacy and Digital Innovation in Improving the Performance of State Universities with Legal Entities (PTNBH) in Malang City. *Erudio Journal of Educational Innovation*, 10(2), 213-233.
- Muttaqin, T. (2018). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 1-23.
<https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27>
- Nastiti, F. E., & 'Abdu, A. R. N. (2020). Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(1), 61-66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um039v5i12020p061>
- Noddings, N. (2013). *Education and Democracy in the 21st Century*. Teachers College Press.

- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805.
- Perdana, N. S. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279–298. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.191>
- PISA 2018 Results: Vol. I. (2019). <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Pratama, N. Y. P., Isa, S. F. P., & Yunita, S. (2022). Analisis Penyebab Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Tuntutan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, 06(02), 9752–9759.
- Riyadi, R., & Ghuzini, D. (2022). Ketimpangan Pendidikan Dan Pendapatan Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Tertinggal, Terdepan Dan Terluar (3T). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 139–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.593>
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish Lessons 3.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* Teachers College Press.
- Sinurat, J. (2024). *Integrasi Antara Pembelajaran Akademik Dan Pembentukan Karakter Siswa*. 2(2), 374–379. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i2.1013>
- Subkhan, E. (2023). Vocationalizing Education: The Dangers of Link-And-Match Paradigm for the Students Future. In *Education in Indonesia: Critical Perspectives on Equity and Social Justice* (pp. 77–97). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-99-1878-2_5
- Thwe, W. P., & Kálmán, A. (2024). Lifelong Learning in the Educational Setting: A Systematic Literature Review. *Asia-Pacific Education Researcher*, 33(2), 407–417. <https://doi.org/10.1007/s40299-023-00738-w>
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Fauzy, M. Z. (2023). Determinan Ketimpangan Pendidikan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 21(1), 101–111. <https://doi.org/10.31294/jp.v21i1.15610>